

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan masalah pada bab sebelumnya serta data yang diperoleh, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum Sistem Pengelolaan Keuangan daerah diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Sistem ini berbasis pada jaringan komputer, yang mampu menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD) dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik. Pengembangan SIPD untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian serta mempermudah mendapatkan informasi. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada BPKAD Kota Jambi diharapkan dapat menjadi alat bantu untuk mengatur keuangan daerah khususnya untuk menganalisa strategi peningkatan kualitas dan efisiensi penggunaan keuangan daerah yang mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sehingga akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang kondusif di Kota Jambi.
2. Laporan Keuangan BPKAD Kota Jambi telah disusun dan disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah. Hal tersebut diperkuat oleh hasil kuesioner yaitu mayoritas responden menjawab setuju bahwa BPKAD Kota Jambi telah menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat

dipahami dan dapat dibandingkan. Namun harus terus dilakukan peningkatan terhadap kualitas laporan sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap pengguna laporan.

3. Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan hubungan yang kuat antara system informasi pengelolaan keuangan daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan dengan korelasi sebesar 71,20% dan sisanya sebesar 28,80% yang dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yang tidak diamati dalam laporan ini. Dilihat dari tingkat signifikasinya dengan  $\alpha = 0,05$ , hasil uji signifikansi simultan menunjukkan probabilitas dibawah 0,05. Dari seluruh analisis tersebut maka hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima. Berarti diperoleh kesimpulan dari hasil laporan bahwa perlakuan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPKAD Kota Jambi
4. Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BPKAD Kota Jambi, untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam menjalankan sistem ini, serta didukung dengan sarana prasarana yang menunjang dalam penerapan semua aplikasi SIPD yang ada baik core system maupun non core harus dijalankan tidak secara parsial, guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

#### **4.2 Saran**

Setelah menyusun laporan keuangan mengenai pengaruh sistem informasi pemerintahan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Jambi, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berdasarkan Permendagri Nomor 13 sebagai penunjang dalam Pengelolaan Penatausahaan Keuangan diharapkan sistem informasi berbasis komputer ini tidak selalu terjadi kendala dalam

jaringan komputer, sehingga perlu penyempurnaan lebih lanjut agar mampu menghubungkan dan menangani konsolidasi data antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik dan memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kota Jambi sebaiknya melakukan upaya peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan. Kendala yang terjadi biasanya terletak pada relevansi dan keandalan terutama penyajian laporan keuangan yang lengkap dan penyajian jujur mengungkapkan seluruh transaksi yang terjadi selama tahun berjalan di BPKAD Kota Jambi, Oleh karna itu keakuratan laporan keuangan harus diperhatikan.
3. Agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pada BPKAD Kota Jambi, sistem yang berjalan yaitu Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditunjang oleh berbagai komponen diantaranya, SDM sebagai user serta pengendalian manajemen seperti pemberian tupoksi yang jelas agar dalam menjalankan SIPD tidak bertumpu pada seseorang sehingga overload pekerjaan dan tupoksi yang jelas, peningkatan sarana serta prasarana seperti PC yang digunakan, jaringan LAN dan internet yang menunjang, serta server yang ada di pusat SKPKD juga lebih ditingkatkan kapasitasnya agar komunikasi data berjalan dengan lancar.

